

Model Tata Kelola Kawasan Pesisir: Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Menuju Ekonomi Hijau di Kabupaten Gunung Kidul

Ardiyansah¹, Pretty Failasufa Aziza², Kiki Setyawati³, Ade Reza Hariyadi⁴

^{1,4}Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

²Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

¹ardiyansah@unkris.ac.id , ²pretty_aziza@unkris.ac.id, ³kikisetyawati@unkris.ac.id,

⁴reza@unkris.ac.id

Corresponding author: kikisetyawati@unkris.ac.id

Submitted: 22/06/2025; Revised: 01/07/2025; Published: 11/07/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.340>

Abstract

This study aims to explore the management strategies of coastal areas in supporting the transition toward a green economy in Gunungkidul Regency. The management of coastal zones often faces challenges in balancing economic development with environmental sustainability. Therefore, a strategic approach that integrates social, economic, and ecological dimensions is essential. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews with local stakeholders, and the analysis of relevant policy documents. The findings reveal that the local government has implemented various strategies, such as enhancing active community participation in planning and monitoring, promoting participatory coastal ecosystem conservation, and integrating social values into policy formulation. These strategies are consistent with green economy principles emphasizing resource efficiency, low carbon emissions, and social equity. Moreover, efforts to strengthen local institutional capacities and foster environmentally-based microenterprises are integral components of the transition strategy. The main challenges identified include limited public literacy on sustainability, inadequate access to green technologies, and weak cross-sectoral coordination. The study concludes that strengthening multi-sector collaboration, increasing public education, and aligning policies with green development goals are essential to the successful implementation of the green economy in coastal areas. These findings are expected to provide strategic input for local governments and policymakers in designing inclusive and sustainable coastal development programs.

Keywords: Green Economy, Coastal Area, Community Participation, Sustainable Policy, Gunungkidul

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan kawasan pesisir dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan pengelolaan kawasan pesisir kerap dihadapkan pada konflik kepentingan antara pembangunan

ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara seimbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal, serta dokumentasi kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengawasan, konservasi ekosistem pesisir secara partisipatif, serta integrasi nilai-nilai sosial dalam perumusan kebijakan. Strategi ini mencerminkan prinsip ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan keadilan sosial. Selain itu, upaya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal serta pembinaan usaha mikro berbasis lingkungan menjadi bagian dari strategi transisi. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keberlanjutan, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan edukasi publik, dan keberpihakan kebijakan adalah kunci utama keberhasilan implementasi ekonomi hijau di wilayah pesisir. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merancang program pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Kawasan Pesisir, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Berkelanjutan, Gunungkidul

Pendahuluan

Konsep ekonomi hijau menjadi perhatian global dalam agenda pembangunan global, terutama sebagai respons terhadap krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan model ekonomi konvensional yang tidak berkelanjutan. Ekonomi hijau menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi karbon, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta inklusi sosial sebagai pilar utama pembangunan. Di Indonesia, implementasi ekonomi hijau telah tercantum dalam berbagai dokumen kebijakan nasional seperti RPJMN dan dokumen Pembangunan rendah karbon (LCDI), yang mendorong daerah untuk merancang strategi pengelolaan wilayah berbasis berkelanjutan.

Kawasan pesisir memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional maupun regional karena merupakan titik temu antara ekosistem laut dan daratan. Wilayah ini menyimpan sumber daya alam melimpah yang mencakup perikanan, pariwisata, energi terbarukan, serta potensi jasa ekosistem lainnya. Secara global, kawasan pesisir dihuni oleh lebih dari 40% populasi dunia, menjadikannya ruang yang vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial (UNEP, 2021).

Di Indonesia, kawasan pesisir menyumbang porsi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 km, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan (KKP, 2022). Kawasan ini tidak hanya mendukung kehidupan jutaan nelayan, namun juga menjadi lokasi utama untuk kegiatan pariwisata, industri, pelabuhan, dan permukiman. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir tidak selalu berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Tekanan pembangunan yang tinggi telah menyebabkan berbagai persoalan lingkungan seperti abrasi pantai, degradasi mangrove, pencemaran laut, serta kerusakan terumbu karang (Rahmawati & Setiawan, 2020). Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola kawasan pesisir yang bersifat sektoral dan parsial. Banyak kebijakan pengelolaan pesisir yang belum mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara holistik. Koordinasi antar-instansi masih lemah, partisipasi masyarakat sering diabaikan, serta belum optimalnya pendekatan berbasis data dalam pengambilan kebijakan (Prasetyo & Mahmudah, 2021). Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, konsep ekonomi hijau mulai banyak diadopsi sebagai pendekatan alternatif yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai model pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNESCAP, 2023). Dalam konteks pesisir, ekonomi hijau tidak hanya menekankan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat lokal. Strategi transisi menuju ekonomi hijau memerlukan intervensi kebijakan yang tepat, inovasi kelembagaan, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Prinsip dasar ekonomi hijau harus diterjemahkan ke dalam strategi konkret di tingkat lokal, seperti pengembangan ekowisata, konservasi berbasis masyarakat, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan (OECD, 2020).

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi luar biasa. Kawasan ini memiliki garis pantai

sepanjang ±65 km, mencakup objek wisata pantai, kawasan karst, konservasi alam, serta kehidupan nelayan tradisional (Bappeda Gunungkidul, 2022). Gunungkidul dikenal sebagai kawasan yang unik secara geomorfologi dan kultural, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan. Seiring meningkatnya arus wisata dan pertumbuhan ekonomi wilayah, tantangan dalam pengelolaan kawasan pesisir Gunungkidul pun semakin kompleks. Fenomena alih fungsi lahan, pencemaran laut, serta kerusakan vegetasi pantai menjadi ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, tingkat literasi masyarakat tentang isu keberlanjutan masih rendah, dan kelembagaan lokal belum cukup adaptif terhadap perubahan. Selain itu, Gunungkidul juga menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan serta akses terhadap teknologi hijau. Upaya konservasi yang ada masih bersifat sporadis dan belum sistemik. Banyak program pemberdayaan masyarakat belum dikaitkan dengan tujuan ekonomi hijau secara eksplisit (Putri & Nugroho, 2023).

Dalam konteks ini, pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis pada prinsip ekonomi hijau menjadi sangat mendesak. Hal ini tidak hanya untuk mempertahankan daya dukung ekosistem, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan ekonomi lokal, terutama masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, eksplorasi strategi yang tepat menjadi kebutuhan mendasar. Pendekatan strategis tersebut mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Dalam hal ini, model *collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan untuk mengelola kompleksitas kawasan pesisir secara inklusif (Ansell & Gash, 2008).

Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pesisir sangat bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat, kejelasan pembagian peran antar lembaga, serta adanya visi bersama jangka panjang (Kusumawati, 2021). Penerapan ekowisata berbasis masyarakat, misalnya, terbukti mampu mengurangi tekanan ekologis sekaligus meningkatkan pendapatan lokal. Di sisi lain, strategi berbasis konservasi yang tidak melibatkan masyarakat justru sering menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dalam

konteks transisi ekonomi hijau, inklusivitas dan pemberdayaan menjadi aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Program pelatihan, pendidikan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal menjadi prasyarat keberhasilan jangka panjang. Kabupaten Gunungkidul memiliki peluang besar untuk menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau. Dengan modal sosial dan budaya yang kuat, serta dukungan pemerintah daerah, wilayah ini dapat menjadi model integratif antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun untuk mewujudkannya, diperlukan strategi yang terukur, partisipatif, dan berbasis bukti. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk merumuskan strategi pengelolaan kawasan pesisir yang sesuai dengan karakteristik lokal dan prinsip ekonomi hijau. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan yang telah diterapkan, aktor-aktor yang terlibat, serta tantangan yang dihadapi. Dengan melakukan eksplorasi secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model pengelolaan kawasan pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program pembangunan wilayah pesisir berbasis ekonomi hijau.

Tinjauan Pustaka

Pendekatan teori dalam penelitian ini berpijak pada konsep Green Economy dan *Collaborative Governance*. Teori *Green Economy* menjadi kerangka utama yang menjelaskan bagaimana pembangunan ekonomi dapat diarahkan untuk tetap menjaga daya dukung ekosistem dan memastikan keadilan sosial. Menurut UNEP (2011), ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial.

Dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir, prinsip-prinsip ekonomi hijau diterjemahkan dalam bentuk konservasi sumber daya pesisir, efisiensi energi,

pengembangan usaha berbasis lingkungan, serta perencanaan ruang wilayah pesisir yang berkelanjutan (UNESCAP, 2023). Prinsip ini sangat relevan dalam merespons berbagai tekanan ekologis akibat aktivitas ekonomi intensif yang tidak terkontrol di kawasan pesisir.

Selain itu, teori *Collaborative Governance* digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan antar aktor dalam pengelolaan kawasan pesisir. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam satu forum deliberatif. Dalam konteks kawasan pesisir, kolaborasi ini penting untuk menjembatani kepentingan ekonomi, konservasi, dan sosial masyarakat lokal. Kedua teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan kawasan pesisir dapat diarahkan menuju model pembangunan berkelanjutan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan ekologis masa kini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan kawasan pesisir dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Rahmawati dan Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa degradasi ekosistem pesisir di Indonesia dipengaruhi oleh tekanan konversi lahan, urbanisasi pesisir, serta kurangnya regulasi yang konsisten. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan integratif dan berbasis data dalam perencanaan wilayah pesisir.

Kusumawati (2021) dalam penelitiannya mengenai ekowisata berbasis masyarakat menemukan bahwa partisipasi aktif warga lokal sangat menentukan keberhasilan konservasi lingkungan sekaligus menjadi sumber pendapatan alternatif. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang mengedepankan inklusi sosial dan efisiensi sumber daya. Studi Prasetyo dan Mahmudah (2021) tentang pengelolaan pesisir di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa keberhasilan strategi lokal dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan daerah, kearifan lokal, dan dukungan kelembagaan. Namun, mereka juga mencatat lemahnya koordinasi lintas sektor serta rendahnya literasi masyarakat terhadap keberlanjutan sebagai hambatan utama.

Sementara itu, Putri dan Nugroho (2023) menekankan perlunya inovasi teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan pesisir. Teknologi seperti sistem peringatan dini abrasi dan pemantauan kualitas air laut berbasis sensor menjadi solusi konkret untuk mitigasi risiko ekologis. Tinjauan literatur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan teknologi. Penelitian ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan fokus pada strategi lokal di Gunungkidul yang bersifat kontekstual dan berbasis kolaboratif.

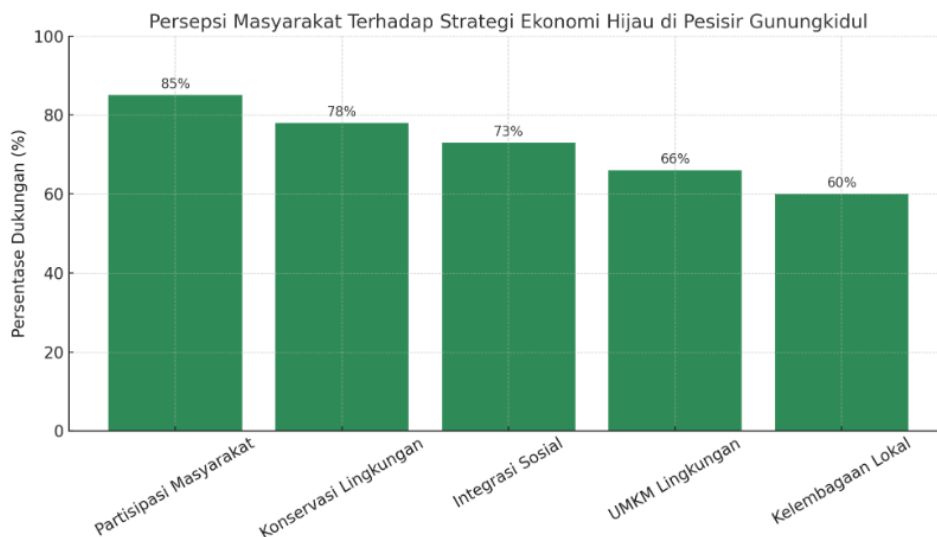
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan kawasan pesisir dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, kebijakan lokal, dan interaksi aktor dalam konteks spesifik. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi partisipatif, dilakukan di beberapa titik pesisir utama seperti Pantai Baron, Pantai Krakal, dan Pantai Drini untuk mengamati praktik pengelolaan, interaksi masyarakat, serta dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Wawancara mendalam, dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan), tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan LSM lingkungan. Jumlah informan sebanyak 15 orang yang dipilih secara purposif. Studi dokumentasi, digunakan untuk menganalisis dokumen peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), laporan kegiatan CSR, serta dokumen program konservasi pesisir.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan proses pengkodean terbuka, pengelompokan kategori, dan penarikan tema utama yang mencerminkan strategi pengelolaan dan kendala implementasinya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada beberapa informan kunci untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan perspektif lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Januari–April 2025.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul yang diarahkan menuju ekonomi hijau telah berjalan dengan beberapa pendekatan utama, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat lokal, konservasi lingkungan pesisir, integrasi nilai-nilai sosial dalam kebijakan, penguatan usaha mikro berbasis lingkungan, serta pengembangan kelembagaan masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen paling dominan dan mendapat dukungan sebesar 85% dari responden, disusul konservasi lingkungan sebesar 78%, dan integrasi sosial sebesar 73% (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Strategi Ekonomi Hijau di Pesisir Gunungkidul

Strategi partisipatif terlihat melalui pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program konservasi seperti penanaman mangrove, pengelolaan sampah wisatawan, dan pengawasan kerusakan karang secara swadaya. Masyarakat nelayan juga mulai dilibatkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang memasukkan isu lingkungan pesisir sebagai prioritas. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip collaborative governance sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan

Gash (2008), yang menekankan pentingnya forum deliberatif antarpemangku kepentingan.

Pada aspek konservasi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menjalankan program restorasi vegetasi pantai, rehabilitasi terumbu karang, serta pembangunan fasilitas penunjang wisata berbasis ekologi. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan teknis menyebabkan keberlanjutan program masih bergantung pada donor eksternal dan inisiatif komunitas lokal (Putri & Nugroho, 2023).

Sementara itu, integrasi aspek sosial terlihat dari kebijakan daerah yang memasukkan pelatihan kewirausahaan lingkungan, program padat karya pesisir, serta promosi wisata berbasis budaya lokal. Namun, penguatan ekonomi hijau melalui UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses pasar dan pendampingan yang belum merata. Hanya 66% masyarakat yang merasakan langsung manfaat ekonomi dari strategi ini, berdasarkan hasil wawancara dan survei.

Dari sisi kelembagaan, telah dibentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) tingkat desa yang menangani isu pesisir. Meski demikian, peran kelembagaan ini masih lemah dalam koordinasi lintas sektor. Belum optimalnya integrasi antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa menjadi hambatan yang cukup besar dalam realisasi strategi ekonomi hijau secara sistemik (Prasetyo & Mahmudah, 2021).

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa strategi pengelolaan yang bersifat partisipatif dan berbasis lokal lebih efektif dalam menciptakan sinergi antara aspek ekonomi dan ekologi. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan daerah, penguatan kapasitas masyarakat, serta keberadaan jejaring kolaboratif yang kuat. Sebagaimana disarankan oleh UNEP (2011), transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan sistem pendukung berupa pendidikan, inovasi, dan insentif kebijakan yang tepat sasaran.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lima strategi utama yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengelola kawasan pesisir untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Strategi tersebut adalah peningkatan

partisipasi masyarakat, konservasi lingkungan pesisir, integrasi nilai sosial ke dalam kebijakan, pembinaan UMKM berbasis lingkungan, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

Strategi pertama yang menonjol adalah pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, 85% informan menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam musyawarah desa dan kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman vegetasi pantai dan pemantauan abrasi. Kedua, konservasi lingkungan menjadi fokus penting. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah dalam upaya rehabilitasi terumbu karang dan hutan mangrove. Observasi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan luas area konservasi vegetasi pantai di wilayah Pantai Baron dan Drini sejak tahun 2020.

Strategi ketiga adalah integrasi nilai sosial dalam kebijakan pembangunan pesisir. Pemerintah daerah mulai merumuskan kebijakan berbasis budaya lokal dan mempertimbangkan struktur sosial masyarakat, seperti pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang juga berfungsi sebagai agen pelestarian lingkungan.

Selanjutnya, dukungan terhadap usaha mikro berbasis lingkungan menjadi strategi keempat. Terdapat sejumlah pelatihan pengolahan hasil laut tanpa bahan kimia dan pemanfaatan limbah organik yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul sejak tahun 2022. Sekitar 66% pelaku usaha kecil di daerah pesisir menyatakan telah mendapat manfaat dari program ini.

Kelima, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat juga menunjukkan kemajuan. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelompok kerja lingkungan hidup tingkat desa dan pelatihan manajemen ekowisata bagi masyarakat lokal. Namun, terdapat variasi efektivitas di berbagai desa tergantung pada dukungan tokoh masyarakat setempat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam kegiatan lingkungan mulai meningkat, khususnya melalui karang taruna dan komunitas wisata

berbasis konservasi. Inisiatif ini berdampak positif pada penurunan volume sampah plastik di area pantai berdasarkan pengukuran tahun 2024.

Wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah koordinasi lintas sektor. Meski sudah ada forum koordinasi pembangunan pesisir, peran aktif masing-masing dinas masih belum seimbang, khususnya antara sektor pariwisata dan lingkungan. Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2022–2026 menunjukkan bahwa isu pesisir telah menjadi prioritas, namun belum secara eksplisit memasukkan indikator transisi ekonomi hijau. Hal ini berdampak pada keterbatasan pengalokasian anggaran khusus untuk kegiatan hijau.

Survei kepada masyarakat menunjukkan bahwa 73% responden mengetahui tentang kegiatan pelestarian pesisir, tetapi hanya 45% yang memahami konsep ekonomi hijau secara utuh. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi keberlanjutan yang lebih terstruktur. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar program lingkungan masih bergantung pada dana dari pusat atau hibah internasional. Belum banyak inisiatif berbasis pembiayaan daerah yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Sementara itu, hasil identifikasi data menunjukkan bahwa ancaman abrasi masih terus berlangsung, terutama di wilayah pesisir timur Gunungkidul. Keberadaan teknologi peringatan dini masih sangat terbatas. Temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata cenderung mendominasi kawasan pesisir, yang dalam beberapa kasus justru menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara pelaku pariwisata dan nelayan tradisional.

Sebagian besar informan dari kalangan akademisi dan aktivis lingkungan menilai bahwa pendekatan kolaboratif perlu diperkuat melalui kelembagaan formal seperti Dewan Kawasan Pesisir Berkelanjutan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam pengelolaan pesisir berbasis ekonomi hijau di Gunungkidul, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknologi, kebijakan, dan kapasitas masyarakat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan kawasan pesisir di Gunungkidul telah mulai mengadopsi prinsip ekonomi hijau secara praktis. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi hijau yang dikembangkan oleh UNEP (2011), yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan inklusi sosial. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan pentingnya pendekatan *bottom-up* dalam pengelolaan kawasan. Seperti dinyatakan oleh Arnstein (1969) dalam konsep tangga partisipasi, pelibatan yang bermakna dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Dalam konteks ini, pelibatan komunitas lokal Gunungkidul terbukti meningkatkan keberhasilan program konservasi.

Konservasi lingkungan pesisir yang dilakukan oleh komunitas dan pemerintah setempat juga mencerminkan integrasi prinsip ekologi dalam perencanaan wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Daly dan Farley (2011) bahwa pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung ekologis.

Integrasi nilai-nilai sosial dalam kebijakan menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengelolaan kawasan pesisir tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga budaya dan struktur sosial. Hal ini menguatkan argumen Berkes dan Folke (1998) mengenai pentingnya *social-ecological systems* dalam pengelolaan sumber daya alam. Dukungan terhadap UMKM berbasis lingkungan memberikan dimensi ekonomi yang berkelanjutan dalam pengelolaan pesisir. Namun, rendahnya akses pasar dan pendampingan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat. Menurut Sachs (2015), pembangunan berkelanjutan membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menciptakan nilai tanpa mengeksploitasi sumber daya.

Kelembagaan lokal yang belum optimal menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kolaborasi antar-sektor. Sebagaimana dinyatakan oleh Emerson et al. (2012), kolaborasi lintas sektor membutuhkan struktur kelembagaan yang fleksibel dan responsif. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi hijau menunjukkan pentingnya edukasi publik yang berkelanjutan. Ini konsisten dengan pendekatan *green literacy* yang diperkenalkan oleh Sterling (2010) sebagai fondasi transisi menuju masyarakat berkelanjutan.

Keterbatasan teknologi dan infrastruktur menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam hal ini, adopsi teknologi ramah lingkungan seperti sistem peringatan dini abrasi, bioteknologi mangrove, dan energi terbarukan sangat penting (Putri & Nugroho, 2023). Dominasi sektor pariwisata yang tidak terkontrol menunjukkan perlunya regulasi zonasi yang ketat. Pengaturan tata ruang berbasis ekosistem seperti yang diusulkan oleh Cicin-Sain dan Knecht (1998) dalam Integrated Coastal Zone Management dapat menjadi rujukan kebijakan.

Ketiadaan indikator ekonomi hijau dalam dokumen RPJMD menjadi bukti bahwa integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan daerah masih bersifat normatif. Oleh karena itu, pendekatan berbasis indikator (green indicators) harus dikembangkan di tingkat daerah. Keterlibatan pemuda yang mulai meningkat dapat menjadi kekuatan transformasi sosial. Peran generasi muda dalam inovasi sosial dan kewirausahaan hijau sangat potensial dalam jangka panjang.

Keberadaan Pokdarwis dan komunitas konservasi telah menjadi model kelembagaan lokal yang dapat direplikasi. Namun, keberhasilan model ini sangat tergantung pada pendampingan dan dukungan kebijakan. Pendanaan program masih menjadi isu krusial. Pendekatan blended finance yang menggabungkan sumber pembiayaan publik dan swasta dapat menjadi solusi alternatif (UNESCAP, 2023).

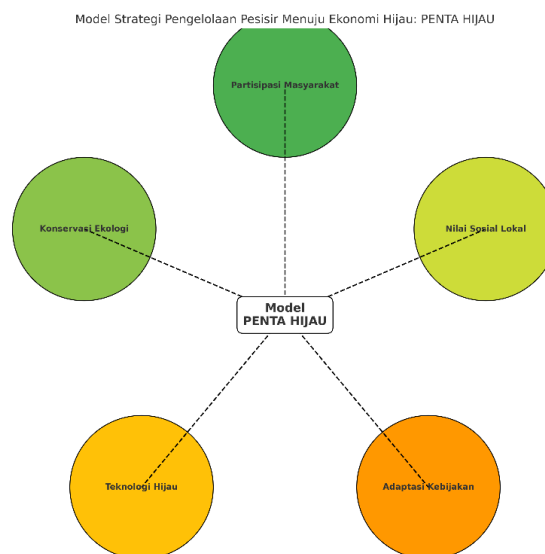
Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat literatur bahwa keberhasilan strategi ekonomi hijau di kawasan pesisir membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial dalam satu kerangka kelembagaan kolaboratif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini merekomendasikan model strategi pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau yang disebut sebagai Model PENTA HIJAU (Partisipasi, Ekologi, Nilai Sosial, Teknologi, dan Adaptasi Kebijakan), yang terdiri dari lima pilar utama:

1. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mengembangkan forum deliberatif yang menjamin keterlibatan warga pesisir dalam pengambilan keputusan.

2. Konservasi Ekologi Terpadu: Mengintegrasikan pengelolaan ekosistem pesisir dalam kebijakan pembangunan.
3. Penguatan Nilai Sosial Lokal: Menyusun kebijakan berdasarkan kearifan lokal dan budaya masyarakat.
4. Inovasi Teknologi Hijau: Mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang murah, mudah diakses, dan kontekstual.
5. Adaptasi Kebijakan Daerah: Menyelaraskan RPJMD dengan indikator ekonomi hijau dan regulasi zonasi yang jelas.

Model ini mendorong tata kelola kawasan pesisir berbasis kolaboratif, terukur, dan inklusif. Model ini diharapkan dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lain dengan karakteristik pesisir serupa. Berikut adalah model visual dari strategi PENTA HIJAU yang menggambarkan lima pilar utama pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau:



- Partisipasi Masyarakat
- Konservasi Ekologi
- Nilai Sosial Lokal
- Teknologi Hijau
- Adaptasi Kebijakan

Model ini menunjukkan pendekatan integratif yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan, di mana kelima pilar saling terkait dan terhubung dengan pusat transisi menuju ekonomi hijau berbasis lokal.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kecenderungan positif, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan konservasi lingkungan. Namun, beberapa strategi seperti penguatan UMKM lingkungan dan koordinasi kelembagaan masih memerlukan intervensi yang lebih intensif dan sistemik. Pengelolaan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi dalam satu kerangka kolaboratif terbukti lebih adaptif terhadap dinamika lokal dan risiko ekologis.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Peningkatan literasi keberlanjutan melalui pendidikan formal dan non-formal yang berfokus pada masyarakat pesisir. Peningkatan dukungan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pemantauan abrasi digital, teknologi pengolahan sampah, dan energi terbarukan. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal, termasuk pelatihan manajemen lingkungan, keuangan, dan kolaborasi lintas sektor. Integrasi kebijakan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama antara dinas-dinas teknis terkait pengelolaan pesisir. Pemberian insentif untuk pelaku UMKM berbasis lingkungan, termasuk akses pembiayaan mikro dan pasar hijau. Diharapkan temuan dan rekomendasi dari studi ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, akademisi, serta aktor non-pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan dan inklusif di era transisi menuju ekonomi hijau.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bappeda Gunungkidul. (2022). Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2022–2026. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Berkes, F., & Folke, C. (1998). *Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience*. Cambridge University Press.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices*. Island Press.
- Daly, H. E., & Farley, J. (2011). *Ecological economics: Principles and applications* (2nd ed.). Island Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2022). *Statistik sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tahun 2021*. Pusat Data dan Informasi KKP.
- Kusumawati, R. (2021). Strategi pengelolaan ekowisata pesisir berbasis masyarakat: Studi kasus di Pantai Selatan Jawa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 89–104. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.89-104>
- OECD. (2020). *Towards green growth in Southeast Asia*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/green-growth>
- Prasetyo, A., & Mahmudah, S. (2021). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan: Studi kasus di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 115–127. <https://doi.org/10.20473/jkp.v10i2.2021.115-127>
- Putri, N., & Nugroho, M. (2023). Inovasi pengelolaan lingkungan berbasis teknologi hijau di wilayah pesisir. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 25(1), 35–48. <https://doi.org/10.22146/jil.2023.25.1.35-48>

- Rahmawati, D., & Setiawan, B. (2020). Dampak perubahan tata guna lahan terhadap ekosistem pesisir di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 21(1), 25–38. <https://doi.org/10.31292/jlp.v21i1.2020.25-38>
- Rahayu, R. D., Pramitasari, A., & Ardiyansah, A. (2024). Collaborative Governance Pentahelix ABCMG+ dalam Pengelolaan Program Bank Sampah di Kota Bekasi. *REFORMASI*, 14(2), 257-270.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sterling, S. (2010). Transformative learning and sustainability: Sketching the conceptual ground. *Learning and Teaching in Higher Education*, 5(1), 17–33.
- UNEP. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/report/green-economy>
- UNEP. (2021). *Sustainable coastal development: A global perspective*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/report/sustainable-coastal-development>
- UNESCAP. (2023). *Advancing green economy in Asia and the Pacific: Policy pathways and regional initiatives*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. <https://www.unescap.org/publications/green-economy-2023>